

REFORMASI ADMINISTRASI

Prof. Dr. Sofian Effendi

Ceramah

Pada Re-entry Workshop Strategic Management of Local Authorities

Diselenggarakan oleh Badan Diklat Depdagri

21 Juli 2000

Why Reformasi Administrasi?

- Reformasi Birokrasi Publik dihindarkan karena mengandung pengertian yang lebih sempit dan hanya mencakup aspek organisasi. Karena itu dalam ceramah ini saya gunakan konsep yang lebih luas;
- Konsep lain yang sering digunakan sebagai pengganti Reformasi Administrasi adalah: Penyempurnaan Administrasi, Perubahan Administrasi dan Modernisasi Administrasi.

Konsep RA

- Peningkatan sistemik kinerja operasional sektor publik secara terencana (Caiden, 1991);
- Penerapan ide-ide baru atau kombinasi ide guna meningkatkan sistem administrasi agar mampu melaksanakan tujuan pembangunan nasional (Lee dan Samonte, 1970);
- Penggunaan otoritas dan pengaruh secara sengaja dan terencana dalam penerapan cara-cara baru terhadap sistem administrasi sehingga untuk merubah tujuan, struktur dan prosedur-nya sehingga meningkat kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan (UNDTTC, 1983);

Konsep RA

- Inovasi secara terencana untuk meningkat-kan kemampuan sistem administrasi sebagai social agent yang lebih efektif, instrumen yang lebih baik untuk menyelenggarakan demokratisasi politik, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi, yang merupakan unsur terpenting dalam proses nation-building dan pembangunan (Samonte, 1970);
- Upaya untuk mengadakan perubahan besar dalam system birokrasi suatu negeri dengan maksud untuk mengadakan transformasi terhadap praktek-praktek, perilaku, dan struktur yang berlaku (Khan, 1981);

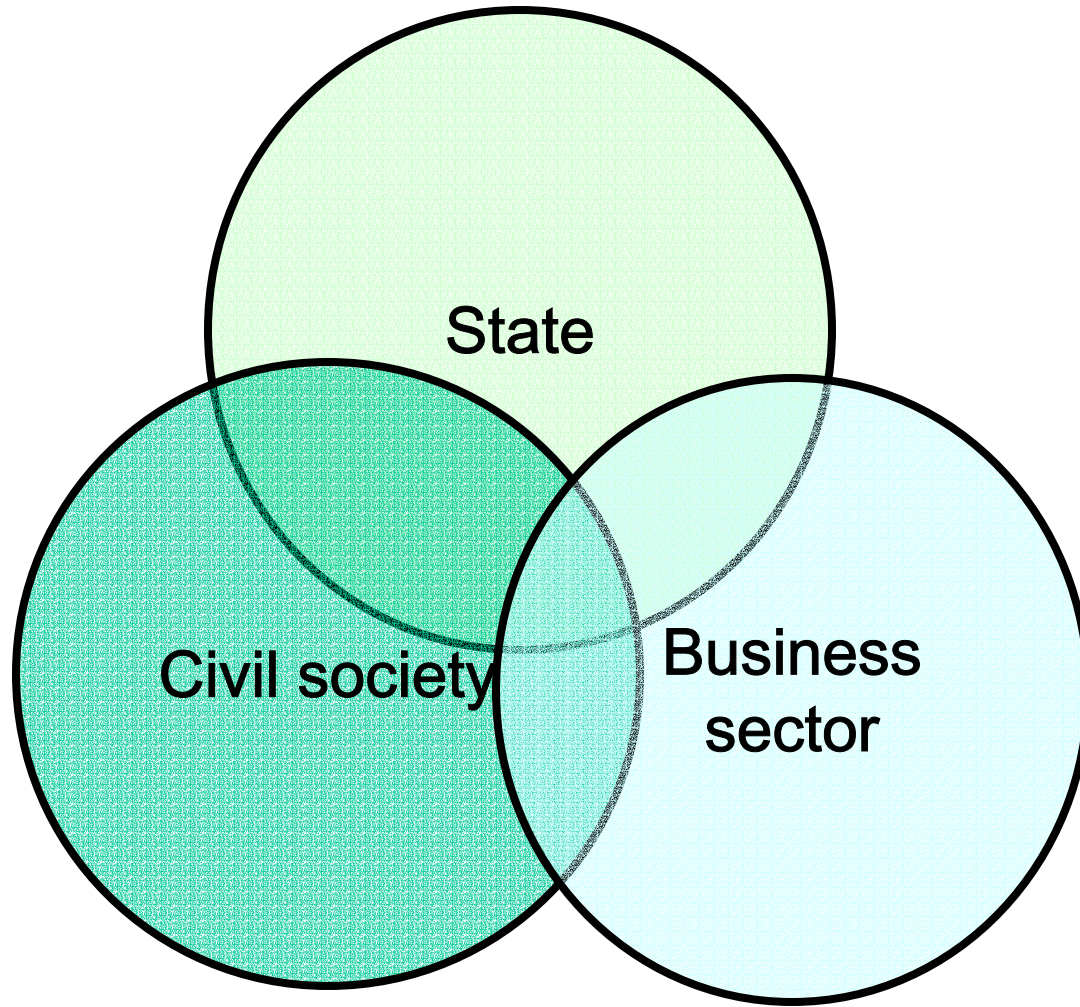
Konsep PA

- Proses yang terencana untuk mengadakan perubahan dalam struktur dan prosedur birokrasi publik, serta sikap dan perilaku para birokrat dalam upaya meningkatkan dayaguna organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan (Quah, 1976)

Perubahan Strategis

- Demokratisasi kehidupan politik
- Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih baik
- Ancaman disintegrasi nasional
- Globalisasi persaingan ekonomi
- Persaingan dalam penguasaan TI
- Netralitas dan Profesionalitas birokrasi

Good Governance



Good Governance

- Adalah penyelenggaraan pemerintahan (*good governance*) yang mampu mendorong dan memfasilitasi terbentuknya hubungan yang saling mendukung, selaras, seimbang dan adil antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.
- Good governance terdiri atas 3 unsur yakni: pemerintah (*the state*), masyarakat (*civil society*) dan dunia usaha (*business sector*).
- Ketiga unsur ini memainkan peranan yang berbeda tetapi harus saling mendukung untuk menciptakan kegiatan produktif yang semakin besar.

Pilar Good Governance

- **Administrative governance:** penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang profesional, netral dan bersih KKN;
- **Political governance:** penyelenggaraan kehidupan politik yang demokratis sehingga kepentingan masyarakat tersalurkan dengan baik dan terdapat *check and balance*;
- **Economic governance:** penyelenggaraan kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan kemakmuran secara adil dan merata.

Kebijakan untuk Meningkatkan Administrative Governance

- Pendayagunaan dan *rightsizing* aparatur negara agar mampu menyelenggarakan pelayanan publik dengan lebih cepat dan lebih baik;
- Privatisasi;
- Pelembagaan mekanisme pembentukan konsensus;
- Mendorong otonomi daerah;
- Meningkatkan keamanan dan stabilitas, menegakkan hukum dan fungsi peradilan;
- Mendorong Pelayanan Prima dan Inovasi;
- Memperluas pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas instansi pemerintah;